



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ISDARMOKO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **736501**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.250.000.000**

1. Tanah Seluas 588 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI  
Rp. 125.000.000
2. Tanah Seluas 288 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL  
SENDIRI Rp. 325.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA  
YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/140 m2 di KAB / KOTA  
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/180 m2 di KAB / KOTA  
BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 8.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
8.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 180.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 345.000.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 2.783.500.000****III. HUTANG****Rp. 7.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 2.776.500.000**

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.